

BAB VI

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dalam rangka menekan laju kerusakan hutan, mencegah konflik dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal disekitar hutan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Barat. (Pokja PPS) Sumatera Barat merupakan stakehoders yang melaksanakan Program Perhutanan sosial yang menjadi salah satu *pilot project* di Indonesia dengan diadopsi nya kegiatan yang telah dilaksanakan, salah satunya pada Pengembangan Hutan nagari Simancuang yang mendapatkan Penghargaan Wana Lestari tahun 2016 dan penghargaan Tokoh Hutan Sosial tahun 2018, hal ini merupakan bukti bahwa dalam pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Di Sumatera Barat berhasil, Khususnya pada hutan Nagari di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, adapun aktor yang terlibat didalam pengembangan hutan nagari Di Simancuang berasal dari berbagai *stakeholders*, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, Lembaga Swadaya Masyarakat KKI Warsi dan Lembaga Pengelola Hutan Nagari Simacuang. Peneliti mengindikasikan kolaborasi aktor dalam pelaksanaan pengembangan Program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang menjadi kunci keberhasilan tersebut.

Dari data yang peneliti temukan dan telah peneliti analisis menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan Program Perhutanan Sosial pada hutan Nagari

Simancuang menurut teori yang dikemukakan Ansell dan Gash adalah sebagai berikut :

1. Dialog antar-muka (*Face to Face Dialog*)

Dalam sebuah kolaborasi komunikasi melalui pertemuan tatap muka menjadi penting untuk menghilangkan persepsi yang buruk terhadap yang lainnya, kolaborasi dalam pengembangan hutan Nagari di Jorong Simancuang, komunikasi dialog antar muka melalui Komunikasi yang rutin sudah dilakukan dengan baik, namun dari indikator kualitas komunikasi belum terlaksana dengan efektif, yang disebabkan oleh tingkat partisipasi dari Pengurus LPHN Simancuang yang menurun mengikuti rapat dan pertemuan rutin, maka dari itu peneliti menyimpulkan dialog antar muka dalam pengembangan Hutan Nagari di Jorong Simancuang belum terlaksana.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Pada kolaborasi pengembangan Hutan Nagari di Jorong Simancuang membangun kepercayaan belum dilakukan sepenuhnya, saling menerima saran dan masukan antar masing masing stakeholder sudah bagus, dan terkait tanggung jawab tugas-tugas yang telah ditetapkan belum dilakukan karena sebagian Pengurus dan masyarakat tidak aktif terlibat dalam kegiatan yang sudah dipercayakan, dalam transparansi akses informasi pelaporan kegiatan justru LPHN Simancuang belum melakukan pelaporan kegiatan, hal ini berdampak kepada tingkat kepercayaan pada tataran pengurus LPHN simancuang dan masyarakat di Jorong Simancuang.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*Commitment to the process*)

Pada kolaborasi Pengembangan Hutan Nagari di Jorong Simancuang, komitmen pada proses kolaborasi belum dilakukan sepenuhnya, mengingat belum

adanya rasa memiliki pada proses dikarenakan masih kurangnya partisipasi pengurus LPHN Simancuang dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan, meskipun pengakuan bersama sudah ada, dan sikap saking terbuka terhadap pencapaian masing-masing aktor yang terlibat sudah ada.

4. Pemahaman bersama (*Share Understanding*)

Kolaborasi pengembangan hutan nagari Simancuang sudah menunjukkan misi yang jelas, terlihat dari tersusunnya Rencana Kerja Hutan Nagari 2017 dan cara untuk mewujudkannya, selanjutnya pada identifikasi masalah umum tiap-tiap pihak sudah menyadari apa yang menjadi kendala dan langkah apa yang akan diambil seperti membangun kepercayaan kembali, dan yang nilai nilai dasar dalam kegiatan pengembangan Hutan Nagari di Jorong Simancuang juga sudah teraplikasi.

5. Dampak Sementara (*Intermediate Outcome*)

Dampak sementara dari kolaborasi pengembangan Program Perhutanan Sosial Pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang adalah adanya tambahan sumber penghasilan masyarakat di Simancuang melalui berbagai kegiatan yang ada didalam rencana Kerja LPHN Simancuang; Berkurangnya tekanan pada Kawasan Hutan lindung yang dikelola oleh LPHN Simancuang, serta terjaganya suplai air untuk pertanian masyarakat, Penghargaan Wana Lestari 2016 dan Penghargaan Tokoh Hutan Sosial 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan hutan.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dalam pengembangan program Perhutanan Sosial pada Hutan Nagari di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, peneliti memberikan saran antara lain:

Seharusnya setiap pihak mengambil inisiatif diadakan rekonsiliasi dalam membangun kepercayaan diantara pengurus dan masyarakat karena pada dasarnya program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri, dengan memperbaiki manajemen pengelolaan laporan kegiatan yang transparan, sehingga dalam kegiatan yang sudah ditetapkan masyarakat ikut berpartisipasi aktif mendukung terwujudnya kegiatan tersebut.

Selain itu Pemerintah Daerah Sumatera Barat harus mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyusun Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Barat (Pokja PPS) yang baru disemua sektor sehingga dalam pelaksanaannya sektor diluar Kehutanan akan ikut membantu kegiatan Rencana kerja yang sudah disusun, Dinas-dinas di lingkungan pemerintah daerah Sumatera Barat harus melakukan sinkronisasi program pembangunan masyarakat pedesaan di mana Program Perhutanan Sosial dapat menjadi sentralnya, hal ini akan mempercepat distribusi asset kelola hutan kepada masyarakat dengan cara-cara yang lestari yang baik untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan.